

PIDATO PANCASILA 1 JUNI 1945 SUKARNO PERSPEKTIF
SPEECH ACT THEORY



Tesis

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Agama (M.Ag)

Disusun Oleh

Alif Rahman Mahfuz

Nim : 24205011024

Dosen Pembimbing

Dr. Novian Widiadharma, S.Fil., M.Hum

PROGRAM STUDI MAGISTER AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM

FAKULTAS USSHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

TAHUN 2026



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA FAKULTAS USHULUDDIN DAN
PEMIKIRAN ISLAM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-636/Un.02/DU/PP.00.9/05/2026

Tugas Akhir dengan judul : **PIDATO PANCASILA 1 JUNI 1945 SUKARNO PERSPEKTIF
SPEECH ACT THEORY**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALIF RAHMAN MAHFUZ, S.Ag
Nomor Induk Mahasiswa : 24205011024 Telah
diujikan pada : Senin, 04 Mei 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Dr. Novian Widiadharna, S.Fil., M.Hum. SIGNED

Valid ID: 6a0a95715b49c

Penguji I



Dr. Mutiullah, S.Fil.l. M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 6a0a8004f3a2f

Penguji II



Dr. Muhammad Fatkhan, S.Ag M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 6a018be419ad0



Yogyakarta, 04 Mei 2026 UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag.,
M.Hum. SIGNED

Valid ID: 6a0c1873f110e

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Alif Rahman Mahfuz

NIM : 24205011024

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Jenjang : S2 (Magister)

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 April 2026

Saya yang menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KAHMAD
YOGYAKARTA



Alif Rahman Mahfuz

NIM. 24205011024

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Alif Rahman Mahfuz
NIM : 24205011024
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : S2 (Magister)
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiasi di dalam naskah tesis ini, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 April 2026

Saya yang menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIDIGRA
YOGYAKARTA



Alif Rahman Mahfuz
NIM. 24205011024

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Ketua Program Studi Magister (S2)

Aqidah dan Filsafat Islam

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan Koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul: Pidato Pancasila 1 Juni 1945 Sukarno Perspektif *Speech Act Theory*

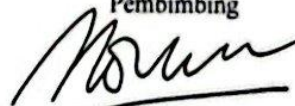
Yang ditulis oleh :

Nama : Alif Rahman Mahfuz
NIM : 2420501104
Fakultas : Ushuluddin Dan Pemikiran Islam
Jenjang : S2 (Magister)
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi : Aqidah dan Filsafat Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, 13 April 2026
Pembimbing



Dr. Novian Widiadharna, S.Fil., M.Hum

ABSTRAK

Pidato yang disampaikan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 di hadapan sidang BPUPKI merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah pembentukan dasar negara Indonesia. Pidato tersebut secara luas dikenal sebagai momen lahirnya gagasan Pancasila sebagai dasar negara. Namun, pidato 1 Juni 1945 tidak hanya dapat dipahami sebagai penyampaian gagasan filosofis mengenai lima prinsip dasar negara, melainkan juga sebagai peristiwa kebahasaan yang memiliki dampak historis dan politik yang luas. Pidato tersebut disampaikan dalam konteks perdebatan ideologis mengenai dasar negara, khususnya terkait hubungan antara nasionalisme dan Islam dalam proses pembentukan negara Indonesia. Dalam konteks tersebut, pidato Soekarno dapat dipahami sebagai tindakan komunikasi politik yang berfungsi membangun dialog, membuka ruang kompromi, serta mendorong terbentuknya konsensus ideologis yang kemudian berlanjut pada perumusan Piagam Jakarta dan pembentukan dasar negara Indonesia.

Penelitian ini berusaha menjawab tiga pertanyaan utama, yaitu bagaimana konsep dasar *Speech Act Theory* dalam memahami bahasa sebagai tindakan yang memiliki kekuatan performatif, bagaimana makna dan konteks historis pidato 1 Juni 1945 dalam kaitannya dengan dinamika hubungan antara nasionalisme dan Islam, serta bagaimana pidato tersebut dapat dipahami dalam perspektif *Speech Act Theory* khususnya pada fungsi ilokusi dan perlokusi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan yang berkaitan dengan pidato 1 Juni 1945, kajian tentang Pancasila, serta teori tindak tutur yang dikembangkan oleh John L. Austin dan John R. Searle. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini menganalisis pidato 1 Juni 1945 sebagai rangkaian tindak tutur yang memiliki dimensi lokusi, ilokusi, dan perlokusi dalam konteks sejarah pembentukan negara Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidato 1 Juni 1945 tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian gagasan mengenai dasar negara, tetapi juga sebagai tindakan komunikatif yang memiliki daya performatif dalam proses pembentukan konsensus ideologis bangsa. Pada tingkat ilokusi, pidato tersebut memuat tindakan pengusulan prinsip dasar negara, penegasan komitmen kolektif, serta pengarahan forum sidang menuju pembentukan dasar negara yang dapat diterima bersama. Sementara itu, pada tingkat perlokusi, pidato tersebut menghasilkan dampak historis yang lebih luas berupa terbukanya ruang kompromi antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam dalam perumusan dasar negara. Dimensi keislaman dalam pidato tersebut terlihat dalam penegasan mengenai pentingnya prinsip ketuhanan serta pengakuan terhadap nilai-nilai religius dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian, pidato 1 Juni 1945 dapat dipahami sebagai tindak tutur konstitutif yang secara historis berkontribusi dalam terbentuknya konsensus ideologis bangsa dan lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Kata Kunci: Speech Act Theory, pidato 1 Juni 1945, perlokusi, nasionalisme dan Islam, Pancasila.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil'alamin allahumma shalli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji dan syukur tiada henti saya haturkan kepada Allah Swt. atas segala karunia, rahmat dan nikmat yang telah diberikan. Begitu luas *rahman* dan *rahim-Nya* yang tak satupun makhluk mampu menyebutkan satu persatu. Salah satu *rahman* dan *rahim-Nyalah*, peneliti dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Pidato Pancasila 1 Juni 1945 Soekarno Perspektif *Speech Act Theory*”. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Saw, yang telah menjadi *ushwatun hasanah* baik dalam bertutur kata maupun berbuat mudah-mudahan kelak kita mendapat syafa'at beliau di *yaumul akhir*, *aamiin allahumma aamiin*.

Selesainya penelitian ini, tentunya tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik secara moral maupun materil. Maka dari itu peneliti menghaturkan terima kasih sebesar-besarnya dan apresiasi setulusnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Muhammad Fatkhan, S.Ag M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Aqidah dan filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Novian Widiadharma, S.Fil.I. M.Hum selaku Dosen Pembimbing Tesis yang begitu sabar dan tulus membimbing, memotivasi serta doa yang luar biasa.

5. Seluruh dosen Program Studi Magister Aqidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sangat berjasa dalam mendidik para mahasiswa selama perkuliahan.
6. Kedua orang tua saya bapak Alimuddin dan ibu Ramlan Tafai yang kasih sayangnya seluas samudera, yang tiada henti-hentinya melangitkan doa terbaik untuk peneliti. Terima kasih banyak atas bimbingan, arahan, kritik, dan saran yang menjadi bekal dalam proses penulisan karya ini. Terima kasih juga kepada kakak dan adik saya yang telah banyak memberikan dukungan dalam terselesaikannya karya tulis ilmiah ini.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini. Hal tersebut disebabkan adanya keterbatasan peneliti baik secara wawasan maupun kemampuan. Kritik maupun saran yang bersifat konstruktif sangat peneliti butuhkan, guna perbaikan dimasa mendatang. Akhirnya semoga karya ini dapat menjadi media berbagi ilmu pengetahuan dan memberikan banyak mafaat bagi siapapun itu. *Aamiin ya rabbal'aalamin.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Maret 2026

Alif Rahman Mahfuz

DAFTAR ISI

Halaman Sampul luar	
Surat Pernyataan Keaslian Tesis	I
Surat Pernyataan Bebas Plagiasi	II
Nota Dinas.....	III
Abstrak	IV
Kata Pengantar.....	V
Daftar isi	VII
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	21
Bab II <i>Speech Act Theory</i> dan Pergeseran Paradigma Filsafat Bahasa.....	24
A. Genealogi <i>Speech Act Theory</i> dalam Tradisi Filsafat bahasa	24
B. <i>Ordinary Language Philosophy</i> Sebagai Landasan <i>Speech Act Theory</i>	29
C. Perubahan Paradigma : <i>Constative VS Constantif</i>	31
D. Konsep <i>Infelicities</i> dalam Tindak Tutur.....	32
E. Tiga Lapisan <i>Speech Act Theory</i>	33
1. Tindak Lokusi	34
2. Tindak Ilokusi	34
3. Tindak Perlokusi	36
F. Relevansi <i>Speech Act Theory</i> dalam Analisis Teks Kenegaraan	37
Bab III Konteks Historis dan Struktur Pidato 1 Juni Sukarno.....	41
A. Konteks Sidang BPUPKI dan Lahirnya Gagasan Dasar Negara	41
B. Teks Pidato Pancasila Sukarno 1 juni 1945	43
1. Struktur Argumentasi Dalam Pidato 1 Juni 1945	46
2. Bahasa Politik dan Retorika Kebangsaan Soekarno	51
3. Pancasila Sebagai Gagasan Ideologis Dalam Pidato 1 Juni 1945.....	55
Bab IV Performativitas Pidato 1 Juni 1945 dalam pembentukan pancasila	58
A. Konstruksi Makna Dalam Pidato 1 Juni 1945.....	58
B. Strategi Persuasif dan Tindakan Ideologis Soekarno.....	61
C. Daya Pengaruh Pidato Terhadap Konsensus Kebangsaan.....	74
Bab V Penutup.....	88
A. Kesimpulan.....	88
Daftar Pustaka	91
Lampiran-Lampiran	97
Daftar Riwayat Hidup	123

Bab I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pidato Ir. Sukarno pada tanggal 1 Juni 1945 di hadapan sidang *Dokuritsu Junbi Chōsa-kai* merupakan peristiwa fundamental dalam sejarah pembentukan dasar negara Indonesia. Pidato ini secara luas dipahami sebagai momen lahirnya gagasan Pancasila, namun signifikansinya tidak berhenti pada pengajuan lima prinsip dasar negara. Pidato 1 Juni 1945 merupakan peristiwa kebahasaan-politik yang bekerja dalam ruang historis tertentu dan menghasilkan dampak berlapis yang berujung pada terbentuknya Pancasila sebagaimana berlaku dalam sistem ketatanegaraan Indonesia hingga saat ini.¹

Secara historis, pidato tersebut disampaikan dalam konteks perdebatan ideologis yang tajam mengenai dasar negara, khususnya terkait relasi antara nasionalisme dan Islam. Komposisi keanggotaan *Dokuritsu Junbi Chōsa-kai* yang didominasi oleh kelompok nasionalis dan kelompok Islam menjadikan forum tersebut sebagai arena negosiasi ideologis yang menentukan arah negara yang akan dibentuk.² Dalam konteks inilah pidato Sukarno berfungsi bukan hanya sebagai penyampaian gagasan filosofis,

¹ Fatkhur Rohman et al., "Analisis Historis Perumusan Pembukaan UUD 1945 Fatkhur", *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, vol. 2, no. 5 (2024), pp. 147–54, <https://doi.org/10.5281/zenodo.11372406>.

² P.E. Gloor et al., *Another Look At The Jakarta Charter Controversy of 1945*, vol. 5, no. 1997 (1997), pp. 1–8.

melainkan sebagai tindakan komunikatif yang diarahkan untuk membangun konsensus ideologis.

Pidato 1 Juni 1945 sering ditempatkan sebagai pendahulu dari lahirnya Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Namun, pembacaan yang terlalu menekankan relasi linear antara pidato 1 Juni dan Piagam Jakarta berisiko mereduksi makna perlokusioner pidato tersebut. Piagam Jakarta sejatinya merupakan salah satu tahap dalam proses historis yang lebih panjang, bukan tujuan akhir dari daya kerja pidato 1 Juni. Proses sejarah justru menunjukkan bahwa rumusan dalam Piagam Jakarta mengalami perubahan mendasar pada 18 Agustus 1945, ketika Pancasila disahkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara yang berlaku secara konstitusional.³

Dengan demikian, pertanyaan penting yang perlu diajukan bukan hanya bagaimana pidato 1 Juni berkontribusi pada lahirnya Piagam Jakarta, tetapi bagaimana pidato tersebut menghasilkan proses perlokusioner yang lebih luas, hingga memungkinkan diterimanya Pancasila dalam bentuk akhirnya sebagai dasar negara Indonesia.⁴ Dalam perspektif ini, Piagam Jakarta dipahami sebagai bagian dari dinamika perlokusioner, sementara

³ Southeast Asia and Program Publications, *Pancasila as the Sole Foundation*, vol. 38, no. 38 (2013), pp. 74–83.

⁴ R.E. Elson, "Two failed attempts to Islamize the Indonesian constitution", *Sojourn*, vol. 28, no. 3 (2013), pp. 379–437.

Pancasila yang berlaku saat ini merupakan manifestasi institusional akhir dari proses tersebut.⁵

Kajian-kajian tentang pidato 1 Juni 1945 selama ini umumnya berfokus pada substansi filosofis Pancasila atau pada rekonstruksi sejarah perumusan dasar negara. Pendekatan-pendekatan tersebut memberikan kontribusi penting, tetapi cenderung memperlakukan pidato 1 Juni sebagai teks ideologis yang maknanya selesai pada tingkat gagasan. Padahal, pidato politik memiliki dimensi performatif, yakni kemampuan bahasa untuk menghasilkan tindakan, menggerakkan proses, dan membentuk realitas institusional.

Dalam kerangka filsafat bahasa, *Speech Act Theory* sebagaimana dikembangkan oleh J. L. Austin dan John R. Searle memandang bahasa sebagai tindakan (*doing things with words*). Melalui perbedaan antara lokusi, ilokusi, dan perlokusi, teori ini memungkinkan analisis terhadap bagaimana ujaran tidak hanya menyampaikan makna, tetapi juga melakukan penilaian, mengarahkan tindakan kolektif, membangun komitmen, serta menghasilkan dampak sosial dan politik yang berkelanjutan.

Dalam perspektif ini, pidato 1 Juni 1945 dapat dipahami sebagai rangkaian tindak tutur yang bekerja secara bertahap. Pada tingkat ilokusi, pidato tersebut mengandung tindakan penilaian, pengusulan, pengarahan,

⁵ Anang Sujoko, Fidelis Anggiornamento Sainio, and Dicky Wahyudi, "Identitas Keindonesiaan dalam Pidato Sukarno pada 1 Juni 1945", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol. 19, no. 2 (2021), p. 188.

dan pembentukan komitmen yang ditujukan kepada forum sidang. Namun, signifikansi utamanya terletak pada tingkat perlokusi, yakni dampak jangka panjang dari ujaran tersebut terhadap proses institusional pembentukan negara. Perlokusi pidato 1 Juni tidak berhenti pada respons audiens atau pada lahirnya Piagam Jakarta, melainkan berlanjut hingga terbentuknya konsensus ideologis yang memungkinkan Pancasila diterima sebagai dasar negara yang final dan mengikat secara konstitusional.

Sejalan dengan pandangan Ludwig Wittgenstein bahwa makna bahasa terletak pada penggunaannya dalam konteks tertentu⁶, pidato Sukarno pada 1 Juni 1945 harus dipahami dalam konteks perjuangan kemerdekaan dan pembentukan negara. Dalam konteks tersebut, bahasa tidak bersifat netral, melainkan sarat dengan fungsi tindakan sosial-politik. Oleh karena itu, memahami pidato 1 Juni sebagai tindak tutur performatif membuka perspektif baru dalam membaca Pancasila, bukan hanya sebagai produk kompromi politik, tetapi sebagai hasil dari proses komunikasi historis yang berdaya konstitutif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis pidato 1 Juni 1945 dalam perspektif *Speech Act Theory* untuk menjelaskan bagaimana pidato tersebut bekerja sebagai tindak tutur konstitutif yang secara perlokusioner menghasilkan Pancasila sebagaimana berlaku saat ini. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya menunjukkan

⁶ Ibrahim M. Jamil et al., *Filsafat Bahasa: Kearifan, Pengetahuan Dan Kebenaran*, vol. IV, no. 2 (2019), pp. 105–16.

bahwa Pancasila bukan sekadar hasil perumusan dokumen hukum, melainkan manifestasi dari daya kerja bahasa dalam membentuk realitas normatif dan institusional bangsa Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Untuk membatasi pembahasan dalam lingkup pembahasan ini, maka perlu dilakukan pembatasan masalah. Dalam hal ini masalah yang akan dikaji dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian yang kemudian dijadikan acuan dalam melakukan penelitian. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dasar *Speech Act Theory* dalam menganalisis bahasa sebagai tindakan yang memiliki kekuatan performatif?
2. Bagaimana makna dan konteks historis pidato Ir. Sukarno pada tanggal 1 Juni 1945, khususnya dalam kaitannya dengan proses lahirnya Piagam Jakarta dan dinamika hubungan antara nasionalisme dan Islam dalam perumusan dasar negara Indonesia?
3. Bagaimana pidato 1 Juni 1945 Ir. Sukarno dapat dipahami dalam perspektif *Speech Act Theory*, terutama dalam melihat fungsi ilokusi dan perlokusi pidato tersebut sebagai tindakan komunikatif yang berpengaruh terhadap pembentukan konsensus ideologis bangsa?

C. Tujuan

1. Untuk menganalisis konsep dasar *Speech Act Theory* dalam menganalisis bahasa sebagai tindakan yang memiliki kekuatan performatif
2. Untuk mengevaluasi makna dan konteks historis pidato Ir. Sukarno pada tanggal 1 Juni 1945, khususnya dalam kaitannya dengan proses lahirnya Piagam Jakarta dan dinamika hubungan antara nasionalisme dan Islam dalam perumusan dasar negara Indonesia.
3. Untuk mengevaluasi pidato 1 Juni 1945 Ir. Sukarno agar dapat dipahami dalam perspektif *Speech Act Theory*, terutama dalam melihat fungsi ilokusi dan perlokusi pidato tersebut sebagai tindakan komunikatif yang berpengaruh terhadap pembentukan konsensus ideologis bangsa.

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, penulis berusaha melakukan peninjauan lebih awal terhadap pustaka yang ada. Peninjauan dilakukan terhadap karya- karya peneliti terdahulu yang memiliki relevansi terhadap topik yang akan diteliti guna mendukung penelitian ini. Dalam hal ini ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu:

Artikel ilmiah yang ditulis oleh Zainal Fadri yang berjudul “*Pidato Pancasila 1 Juni 1945 Sukarno: Perspektif Ordinary Language Philosophy*” pada Jurnal Rontal Keilmuan PKN tahun 2020 menganalisis pidato Sukarno 1 Juni 1945 dengan menggunakan teori *Ordinary Language Philosophy* J. L. Austin untuk menunjukkan bahwa bahasa

dalam pidato tersebut tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga performatif. Melalui pendekatan ini, Fadri menemukan bahwa pidato Sukarno mengandung berbagai bentuk yang memiliki kekuatan membentuk tindakan sosial dan politik. Penelitian ini menegaskan bahwa pidato Sukarno berfungsi sebagai tindakan bahasa yang mewujudkan cita-cita pendirian bangsa dan menjadi dasar ideologis Pancasila, sehingga perlu terus ditafsirkan ulang oleh generasi penerus agar nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam konteks zaman.

Penelitian ini juga menggunakan teori dari J.L Austin dalam menganalisis pidato 1 Juni Sukarno namun berbeda dengan penelitian yang akan saya lakukan karena *Ordinary Language Philosophy* terbagi menjadi dua yaitu *Utterances* dan *Speech Act*, sedangkan penelitian saya berfokus pada *speech act* dan akan mengkaji lebih banyak pada teks Pancasila sedangkan penelitian ini tidak membahas teks Pancasila namun membahas bagian-bagian lain di dalam Pidato 1 Juni Sukarno. Tidak hanya itu penelitian yang akan saya lakukan akan lebih dalam lagi membahas *speech act* karena saya tidak hanya menggunakan teori dari J.L Austin tetapi juga akan dikembangkan ke teori *Speech act* yang telah dikembangkan oleh Searle.⁷

Artikel karya Dhea Tisane Ardhan pada tahun 2023 berjudul *Analisis Tindak Tutur Ilokusi dalam Pidato Pembukaan Presiden Joko*

⁷ Zainal Fadri, "Pidato Pancasila 1 Juni 1945 Sukarno Perspektif Ordinary Language Philosophy", *Jurnal Rontal Keilmuan PKN*, vol. 6, no. 2 (2020), p. 22, file:///C:/Users/Asus/Downloads/1791-3864-1-PB (1).pdf.

Widodo pada KTT G20 Bali meneliti penggunaan tindak tutur ilokusi dalam pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo saat membuka KTT G20 di Bali. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan data berupa transkrip pidato. Berdasarkan analisis, ditemukan lima tipe tindak tutur ilokusi menurut teori Searle, yaitu direktif, asertif, deklaratif, ekspresif, dan komisif, dengan tindak tutur direktif sebagai tipe yang paling dominan. Hasil ini menunjukkan bahwa pidato Presiden tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi formal, tetapi juga sebagai instrumen untuk mempengaruhi dan mengarahkan audiens terhadap isu-isu global seperti krisis pangan, energi, dan perdamaian dunia. Penelitian ini juga menegaskan relevansi teori tindak tutur dalam memahami strategi komunikasi politik dan diplomasi internasional seorang pemimpin negara.⁸

Artikel “Commissive Speech Act in Indonesian Presidential Debate” karya Abdulloh Husain dkk pada tahun 2020 membahas penggunaan tindak tutur komisif dalam debat calon presiden Indonesia tahun 2019 dengan pendekatan pragmatik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis dan fungsi tindak tutur komisif yang digunakan oleh para kandidat. Berdasarkan teori tindak tutur dari Austin dan Searle, ditemukan enam jenis tindak tutur komisif yakni *offer*, *commit*, *promise*, *threat*, *guarantee*, dan *bet* serta enam fungsi utama, yaitu *information*, *capability*, *sympathy*, *apology*, *guarantee*, dan *convince*. Data penelitian

⁸ Dhea Ardhan, “Analisis Tindak Tutur Ilokusi Dalam Pidato Pembukaan Presiden Joko Widodo Pada Ktt G20 Bali”, *MEMACE: Jurnal Linguistik, Pendidikan Bahasa Indonesia, dan Asing*, vol. 1, no. 2 (2023), pp. 46–54.

diambil dari video debat yang disiarkan Kompas TV dan dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui teknik simak dan catat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk tindak tutur yang paling dominan digunakan oleh para kandidat, terutama Jokowi, Prabowo, dan Sandiaga Uno, adalah tindak tutur *promise* atau janji yang muncul dalam bentuk kalimat masa depan, klausa pengandaian (*if clause*), dan ungkapan religius seperti *Insyallah*. Fungsi utama dari penggunaan tindak tutur ini adalah untuk menunjukkan kemampuan (kapabilitas) dan membangun simpati publik agar memperoleh dukungan politik.⁹

Artikel ilmiah yang ditulis oleh Ganjar Razuni, Seorang Politikus dari partai golkar dan Guru besar Ilmu Politik Univeritas nasional dalam jurnal wacana politik di *Department Political Science, Faculty of Social and Political Sciences, National University* yang berjudul “*Bung Karno’s political thought according to Pancasila: a Study of Bung Karno’s Speech on June 1, 1945, and the President Sukarno/Bung Karno’s Pancasila Course Throughout 1958-1959*”. Artikel ini berisi tentang evolusi pemikiran politik Sukarno tentang Pancasila, mulai dari pidato 1 Juni 1945 yang melahirkan gagasan dasar lima sila hingga Kursus Pancasila 1958–1959 yang memperdalam makna tiap prinsip. Dengan pendekatan kualitatif dan teori dekonstruksi Derrida, penulis menunjukkan bahwa Pancasila bagi Sukarno bukan hanya konsep teoretis, melainkan alat politik praktis untuk

⁹ Abdulloh Husain, Hamamah Hamamah, and Ika Nurhayani, “Commissive Speech Act in Indonesian Presidential Debate”, *OKARA: Jurnal Bahasa dan Sastra*, vol. 14, no. 1 (2020), p. 81.

mengelola keragaman, mencegah polarisasi, serta membangun demokrasi sosial dan keadilan. Sukarno menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai fondasi moral yang menyatukan sila-sila lain, sementara nasionalisme, kemanusiaan, musyawarah, dan keadilan sosial dijadikan pilar untuk mewujudkan persatuan bangsa. Artikel ini juga menyoroti upaya de-Sukarnoisasi di era Orde Baru dan menegaskan bahwa Pancasila tetap relevan sebagai ideologi terbuka yang dapat ditafsir ulang sesuai dinamika sosial-politik Indonesia.¹⁰

Sebuah tesis yang ditulis oleh Mukoyimah, Seorang mahasiswa Magister di Program Studi Komunikasi dan penyiaran islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul “Retorika Dalam Pidato Sukarno Pada Demokrasi Terpimpin (Analisis Bahasa)”. Tesis ini berfokus pada retorika dalam pidato Sukarno sebagai bagian dari analisis dakwah dan bagaimana Sukarno dalam setiap pidatonya memilih diksi yang mudah dipahami dan menggunakan bahasa yang runtut agar Pancasila mudah diterima di hati masyarakat.¹¹

Artikel ilmiah yang ditulis oleh Andi Mulyani Kone, Seorang Dosen fakultas sastra Universitas muslim Indonesia yang berjudul “*Repetitions in Sukarno’s speech*”. Artikel ini berisi tentang penggunaan gaya bahasa pengulangan dalam pidato-pidato Sukarno pada periode

¹⁰ Ganjar Razuni, “Bung Karno’s Political Thought According To Pancasila: A Study of Bung Karno’s Speech on June 1, 1945, and the President Sukarno/Bung Karno’s Pancasila Course Throughout 1958-1959”, *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, vol. 8, no. 2 (2023), p. 223.

¹¹ Mukoyimah, *Retorika Dalam Pidato Sukarno Pada Demokrasi Terpimpin (Analisis Dakwah)* (2018), p. 165.

1965–1967 dengan pendekatan *Critical Discourse Analysis* model Teun van Dijk dan Norman Fairclough. Penelitian ini menemukan tiga jenis repetisi yang dominan, yaitu anaphora (pengulangan di awal kalimat), epizeuxis (pengulangan langsung berturut-turut), dan tautotes (pengulangan kata dalam satu konstruksi kalimat).

Repetisi tersebut berfungsi untuk menekankan ide, memperkuat pesan, membangun kohesi teks, serta memberi irama yang khas dalam pidato. Melalui strategi bahasa ini, Sukarno mampu menegaskan semangat revolusi, mendorong persatuan, dan menyampaikan gagasannya dengan kuat kepada rakyat. Dengan demikian, artikel ini menegaskan bahwa repetisi bukan sekadar gaya retorika, melainkan alat efektif bagi Sukarno dalam menggerakkan massa dan memperkokoh makna ideologis dalam pidatonya.¹²

Artikel ilmiah yang ditulis oleh Martina Mulyani dan VinaNurviyani, Seorang Dosen STKIP Pasundan, Indonesia Universitas Suryakencana, Indonesia yang berjudul “The Analysis of Sukarno’s Speech on NationFoundation: Demystifying the Ideology of PancasilaUsing Foucauldian Methods”. Artikel ini berisi tentang pidato 1 Juni 1945 Sukarno dengan menggunakan analisis wacana kritis ala Foucault. Kajian ini menelusuri konteks, teks, retorika, hingga pernyataan ideologis dalam pidato, dan menemukan bahwa Sukarno menekankan lima prinsip dasar nasionalisme Indonesia, internasionalisme dan kemanusiaan,

¹² A. Kone, *Repetitions in Sukarno’s speech* (2019), pp. 2–7.

demokrasi permusyawaratan, kesejahteraan sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa yang kemudian ia padatkan menjadi tiga prinsip (socio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan kepercayaan kepada Tuhan) serta dirangkum lagi dalam satu asas utama, yaitu gotong royong. Dengan strategi retorika persuasif, Sukarno menggambarkan Pancasila sebagai dasar yang mempersatukan bangsa yang majemuk untuk bekerja sama demi keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan. Artikel ini menegaskan bahwa melalui Pancasila, Sukarno ingin menanamkan semangat kebersamaan dan harmoni dalam keberagaman sebagai pondasi ideologi bangsa Indonesia.¹³

Artikel ilmiah yang ditulis oleh Anang Sujoko, Fidelis Aggionamento Sainio dan Dicky Wahyudi, Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, yang berjudul “Identitas Keindonesiaan dalam Pidato Sukarno pada 1 Juni 1945”. Artikel ini berisi tentang bagaimana Sukarno membangun dan menegaskan identitas bangsa Indonesia melalui pidato-pidatonya, khususnya terkait perumusan Pancasila dan semangat kemerdekaan.

Kajian ini menyoroti bahwa Sukarno menggunakan retorika yang kuat, simbol-simbol historis, serta gagasan persatuan untuk menanamkan kesadaran kebangsaan pada rakyat. Identitas keindonesiaan yang ditawarkan Sukarno berakar pada nilai gotong royong, nasionalisme yang

¹³ Martina Mulyani and Vina Nurviyani, *The Analysis of Sukarno's Speech on Nation Foundation: Demystifying the Ideology of Pancasila Using Foucauldian Methods*, vol. 82, no. Conaplin 9 (2017), pp. 122–6.

inklusif, penghargaan terhadap keberagaman suku, agama, dan budaya, serta tekad untuk mewujudkan keadilan sosial. Dengan demikian, artikel ini menyimpulkan bahwa pidato Sukarno bukan sekadar seruan politik, tetapi juga sarana ideologis untuk membentuk kesadaran kolektif bangsa dan memperkuat fondasi identitas nasional Indonesia.¹⁴

Artikel ilmiah yang ditulis oleh Paisol Burlian, Seorang Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, yang berjudul "Pemikiran Sukarno Dalam Perumusan Pancasila". Artikel ini berisi tentang kontribusi gagasan Sukarno dalam sidang *Dokuritsu Junbi Chosa-Kai* 1 Juni 1945 yang melahirkan konsep awal Pancasila sebagai dasar negara. Tulisan ini menyoroti bagaimana Sukarno merumuskan lima sila nasionalisme internasionalisme/kemanusiaan, demokrasi permusyawaratan, keadilan sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa serta menekankan prinsip gotong royong sebagai inti dari seluruh sila. Kajian ini juga menunjukkan bahwa pemikiran Sukarno berangkat dari kesadaran historis, realitas sosial bangsa Indonesia yang majemuk, serta semangat anti-kolonialisme. Dengan demikian, artikel ini menyimpulkan bahwa Sukarno melihat Pancasila bukan hanya sebagai dasar konstitusional, tetapi juga sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjawab tantangan kebangsaan dan menjadi pedoman hidup bagi bangsa Indonesia.¹⁵

¹⁴ Sujoko, Saintio, and Wahyudi, "Identitas Keindonesiaan dalam Pidato Sukarno pada 1 Juni 1945".

¹⁵ Paisol Burlian, *Pemikiran Sukarno Dalam Perumusan Pancasila* (2022), pp. 143–69.

E. Kerangka Teori

Pada umumnya para filsuf dan ahli filsafat dibidang politik telah banyak mendefenisikan tentang pidato politik. Filsuf seperti Aristoteles menyimpulkan bahwa pidato politik bertujuan untuk mendorong atau menolak suatu kebijakan yang menyangkut masa depan polis atau biasa kita sebut sebagai kota atau negara. Secara umum defenisis ini senada dengan para ahli filsafat yang lain seperti John Searle, Jurgen Hebermas dan Hannah Arend yang berpendapat bahwa pidato politik ditujukan untuk menciptakan realitas sosial-politik yang baru.

Banyaknya defenisi yang ada dapat dianggap bahwa pidato politik ini dapat dipahami sebagai ungkapan yang bertujuan memengaruhi mengarahkan, atau melegitimasi tindakan politik di ruang publik, sekaligus mencerminkan eksistensi manusia sebagai makhluk politik dan menciptakan realitas sosial-politik melalui bahasa. Pidato bukan sekadar penyampaian informasi, tetapi juga sarana untuk membentuk wacana dan menciptakan realitas politik baru. Dalam konteks Indonesia, pidato 1 Juni 1945 Sukarno adalah pidato monumental yang berfungsi untuk menawarkan dasar negara sebagai konsensus bersama.

Dalam Memahami Pidato politik ada sebuah teori yang disebut *Speech Act Theory*. Teori tindak tutur atau *Speech Act Theory* diperkenalkan oleh J. L. Austin dalam bukunya *How to Do Things with Words* (1962) dan dikembangkan lebih jauh oleh John Searle. Inti teori ini adalah bahwa

bahasa tidak hanya digunakan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk melakukan tindakan (*doing things with words*).¹⁶

Austin membagi tindak tutur ke dalam tiga level, yang pertama adalah *Locutionary act* yakni tindakan mengucapkan sesuatu, yang kedua ada *Illocutionary act* yakni maksud di balik ucapan dapat berupa fungsi atau tujuan dari pidato itu. Lalu yang terakhir adalah *Perlocutionary Act* merupakan dampak atau efek yang ditimbulkan pada pendengar.¹⁷

Searle kemudian mengklasifikasikan tindak tutur ke dalam lima kategori. *Assertives* yang menyatakan fakta atau keyakinan, *directives* yang mengajak atau memerintah audiens untuk bertindak, *commissives* yang menunjukkan janji atau komitmen, *expressives* yang mengekspresikan perasaan atau sikap, dan *declarations* yang melalui ucapan dapat menciptakan realitas baru. Dalam konteks pidato politik seperti 1 Juni 1945, Sukarno tidak hanya menyampaikan ide tentang dasar negara (*assertives*), tetapi juga mengajak rakyat bersatu (*directives*), menunjukkan komitmennya terhadap kemerdekaan (*commissives*), menyalurkan semangat kebangsaan (*expressives*), serta mendeklarasikan konsep Pancasila sebagai fondasi bangsa (*declarations*).¹⁸

Penggunaan teori tindak tutur (*speech act theory*) dalam menganalisis Pidato 1 Juni 1945 Sukarno memiliki relevansi yang kuat

¹⁶ Akhmad Saifudin, "Teori Tindak Tutur dalam Studi Linguistik Pragmatik", *LITE: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya*, vol. 15, no. 1 (2019), pp. 1–16.

¹⁷ J.L. Austin, "How To Do Things With Words", *The Aging Mind* (London: Oxford At The Clarendon Press, 1962).

¹⁸ John R... Searle, *Speech Acts : An Essay in the Philosophy of Language*, vol. 46, no. 1 (1970), pp. 217–27.

karena pidato politik pada dasarnya tidak hanya menyampaikan gagasan, tetapi juga mengandung fungsi performatif yang berpengaruh terhadap realitas sosial dan politik. Teori ini memungkinkan peneliti untuk membedah pidato Sukarno dalam tiga tingkatan, yakni *locutionary* (apa yang dikatakan: gagasan Pancasila sebagai dasar negara), *illocutionary* (maksud yang ingin dicapai: ajakan agar *Dokuritsu Junbi Chosa-Kai* menerima Pancasila), dan *perlocutionary* (efek yang ditimbulkan: lahirnya Pancasila sebagai konsensus dasar negara). Dengan pendekatan ini, pidato dapat dipahami sebagai tindakan politik yang membentuk arah perjalanan bangsa, bukan sekadar wacana retorik.

Selanjutnya, klasifikasi tindak tutur menurut John Searle memperkaya analisis dengan menguraikan fungsi-fungsi bahasa yang hadir dalam pidato. *Assertives* membantu mengidentifikasi bagian pidato yang menegaskan fakta kondisi bangsa; *directives* menunjukkan ajakan atau dorongan Sukarno kepada audiens; *commissives* memperlihatkan komitmen terhadap cita-cita kemerdekaan; dan *declarations* mengungkapkan bagaimana pidato menciptakan realitas politik baru berupa pengenalan Pancasila sebagai ideologi negara. Kerangka ini memungkinkan penelitian untuk menguraikan makna Pancasila dalam perspektif filsafat bahasa, sekaligus menegaskan posisi pidato 1 Juni sebagai peristiwa linguistik dan politik yang menentukan dalam sejarah Indonesia.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini disusun sebagai penulisa karya ilmiah, sehingga diperlukan langkah-langkah yang baik dan benar agar menghasilkan penelitian yang objektif dan dapat dipertanggung jawabkan hasilnya secara akademis. Untuk itu, terdapat setidaknya lima hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penelitian ini, yaitu jenis penelitian, sumber data yang digunakan dalam penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data, dan pendekatan yang digunakan.¹⁹

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian kepustakaan. Oleh karena itu metode yang digunakan ialah metode *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari informasi melalui pembacaan terhadap literasi pustaka dan surat kabar.²⁰

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam sebuah penelitian dapat digolongkan kedalam dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data tertulis yang telah dipublikasikan. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data tentang Pancasila pada pidato Ir.

¹⁹ Inayah dkk Rohmaniyah, *PEDOMAN PENULISAN PROPOSAL DAN SKRIPSI* (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

²⁰ Cisneros Ortega Sara Patricia, "Analisis Penerapan Sistem Klasifikasi Ddc Dalam Pengolahan Pustaka", *Edukasi Non Formal*, vol. 3, no. 2 (2021), p. 6.

Sukarno dalam pidato 1 Juni 1945 serta data lain yang dibutuhkan dalam penelitian.

a. Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang dijadikan sumber penelitian dan pengkajian dalam tesis ini. Sumber data primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah teks Pidato 1 Juni milik Ir. Sukarno yang mana dalam pidatonya ini beliau menyampaikan aspirasinya tentang perumusan dasar-dasar negara yang beliau sebut sebagai Pancasila. Usulan-usulan dalam pidato inilah yang kemudian dibahas lebih lanjut dan menjadi rumusan Pancasila yang kita pakai sebagai dasar negara hingga saat ini.

b. Sekunder

Sumber data sekunder adalah data penunjang yang dapat digunakan untuk mendukung data primer, sehingga berfungsi untuk melengkapi data primer. Sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah berbagai tulisan-tulisan lain yang mengkaji Pidato 1 Juni Ir. Sukarno dan Pancasila baik berupa buku, artikel, skripsi, jurnal, dan segala bentuk tulisan yang membahas topik terkait dan dapat penulis temukan dalam proses penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan data

Dalam teknik pengumpulan data, metode yang

penulis gunakan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan adalah dengan melakukan penelusuran literatur yang berkaitan dengan topik yang dibahas (library research). Selanjutnya penulis melakukan pembacaan secara cermat terhadap data-data yang diperoleh, baik itu data primer maupun data sekunder. Kemudian melakukan pemilahan terhadap bagian-bagian yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang hendak dipecahkan.

4. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan berpedoman pada tahap tahap Teori tindak tutur atau *Speech Act Theory* diperkenalkan oleh J. L. Austin dan Searle yang telah penulis rangkum kedalam empat tahapan yaitu :

a. Mengidentifikasi Konteks Pidato

Teknik analisis data pada tahap ini dilakukan dengan menelusuri latar historis, situasi sosial-politik, serta kondisi kebangsaan pada saat pidato 1 Juni 1945 disampaikan. Data diperoleh dari dokumen sejarah, risalah sidang *Dokuritsu Junbi Chosa-Kai*, serta literatur sekunder yang relevan. Tujuannya adalah memahami siapa audiens utama pidato (*Dokuritsu Junbi Chosa-Kai*), apa tujuan utama pidato

(merumuskan dasar negara), serta kondisi yang melatarbelakangi munculnya gagasan Pancasila. Identifikasi konteks ini penting agar analisis tindak tutur tidak terlepas dari realitas historis yang melingkupinya.

b. Menganalisis level tindak tutur Austin

Pada tahap ini, data dianalisis dengan membagi isi pidato ke dalam tiga tingkatan tindak tutur: *locutionary*, *illocutionary*, dan *perlocutionary*. Analisis *locutionary* dilakukan dengan menelaah apa yang dikatakan Sukarno secara literal, misalnya pengusulan lima sila. Analisis *illocutionary* diarahkan pada maksud yang terkandung dalam tuturan, seperti ajakan untuk menyepakati dasar negara. Sementara itu, analisis *perlocutionary* difokuskan pada efek pidato, yakni terbentuknya konsensus dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila.

c. Mengklasifikasikan tindak tutur menurut Searle

Teknik analisis data selanjutnya adalah mengelompokkan bagian-bagian pidato sesuai dengan kategori tindak tutur Searle: *assertives*, *directives*, *commissives*, *expressives*, dan *declarations*. Analisis ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi kalimat-kalimat Sukarno yang menyatakan fakta kondisi bangsa (*assertives*), ajakan kepada audiens (*directives*), komitmen terhadap

kemerdekaan (*commissives*), ungkapan semangat kebangsaan (*expressives*), hingga pernyataan yang menciptakan realitas politik baru berupa Pancasila (*declarations*). Dengan klasifikasi ini, peneliti dapat memetakan fungsi-fungsi bahasa dalam pidato secara lebih sistematis.

d. Menafsirkan makna politik dari tindak tutur

Tahap terakhir adalah menafsirkan makna politik dari tindak tutur yang telah dianalisis. Analisis diarahkan pada bagaimana pidato Sukarno berfungsi untuk membangun legitimasi politik, menciptakan konsensus, dan memperkenalkan Pancasila sebagai dasar negara. Teknik yang digunakan adalah analisis interpretatif, yakni menghubungkan hasil klasifikasi tindak tutur dengan konteks historis dan tujuan politik pidato. Dengan demikian,

data tidak hanya dipahami sebagai bentuk linguistik, tetapi juga sebagai sarana politik untuk meletakkan fondasi ideologis bangsa Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini, maka penelitian ini disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut. Bab pertama, yaitu pendahuluan. Dalam bab ini, terdapat tujuh subbab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,

telaah pustaka, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan bagian yang sangat penting sebab dapat memberikan pemahaman awal bagi pembaca tentang penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari permasalahan yang menjadi landasan penelitian dan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam hal ini, penjelasan yang bersifat metodologi mengenai penelitian terhadap Pancasila dalam Pidato 1 Juni 1945 dalam perspektif filsafat politik penulis sajikan dalam bab ini.

Bab kedua, yaitu bab yang berisi tentang penjelasan terperinci mengenai *Theory Speech Act* dari J.L Austin yang kemudian dikembangkan oleh Searle. Tentu didalam bab ini terdapat penjelasan mengenai bagaimana teori ini muncul dan bagaimanapun teori ini seharusnya digunakan dalam menganalisis sebuah teks pidato. Langkah demi langkah metode dalam teori speech act akan dijelaskan dan dirangkum dalam bab ini.

Bab Ketiga, yaitu berisi tentang kumpulan data yang dibutuhkan untuk menganalisis Pancasila dalam pidato 1 Juni melalui perspektif *Speech act theory*. Bagian ini berfokus pada teks pidato 1 Juni. Pidato 1 Juni Ir. Sukarno akan dimunculkan mulai dari teksnya dan bagian-bagian penting yang dibutuhkan dari teks dalam menganalisis pidato 1 Juni terutama bagian Pancasilanya.

Bab keempat berisi data yang akan diolah oleh peneliti menjadi sebuah pembahasan yang utuh berupa data linguistik yang akan menelusuri bagaimana Pancasila dalam pidato 1 Juni Ir. Sukarno di artikan secara literar

tanpa ada aspek-aspek lain dalam memaknainya selain secara bahasa. Lalu data berikutnya merupakan keadaan negara dan kondisi Sukarno pada saat itu sehingga dapat ditarik benang merah terkait tujuan dan untuk apa pidato itu diucapkan terutama pada bagian lima sila yang Sukarno inginkan untuk menjadi dasar negara. Hal ini juga menyangkut bagaimana tindak tutur Sukarno saat itu. Pada bagian akhir, pengumpulan data yang dilakukan merupakan data yang berisi kondisi dan situasi pada masa setelah perumusan Pancasila dalam pidato 1 Juni itu. Hal ini terkait bagaimana Pancasila menjadi dasar negara dan bagaimana dampak Pancasila mendorong negara Indonesia untuk sampai ke titik sekarang ini. Dan terakhir bab ke lima, yaitu berisi kesimpulan dari setiap pembahasan dan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti. Pada bab inilah bagaimana pemikiran Ir. Sukarno terhadap Pancasila disimpulkan melalui metode hermeneutika objektif

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini menghasilkan sejumlah simpulan yang terstruktur secara konseptual dan historis. Pertama, berkenaan dengan konsep dasar *Speech Act Theory*, penelitian ini menegaskan bahwa teori yang dirintis oleh John L. Austin dan dikembangkan lebih lanjut oleh John R. Searle memposisikan bahasa tidak semata-mata sebagai instrumen representasi makna, melainkan sebagai tindakan yang memiliki daya performatif. Bahasa, dalam perspektif ini, merupakan praktik sosial yang mampu menghasilkan konsekuensi nyata. Melalui perbedaan analitis antara lokusi, ilokusi, dan perlokusi, teori tindak tutur menyediakan perangkat konseptual untuk memahami bagaimana suatu ujaran dapat mengandung penilaian, mengarahkan tindakan, membentuk komitmen normatif, mengonstruksi relasi sosial, serta memengaruhi konfigurasi sosial-politik secara konkret. Dengan demikian, teori ini memiliki relevansi yang kuat dalam menganalisis teks politik, khususnya pidato, sebagai tindakan komunikatif yang bersifat aktif, intensional, dan tidak pernah netral dalam konteks kekuasaan dan pembentukan legitimasi.

Kedua, terkait makna dan konteks historis pidato yang disampaikan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, penelitian ini menunjukkan bahwa pidato tersebut lahir dalam momentum historis yang sangat menentukan, yakni proses perumusan dasar negara Indonesia dalam sidang BPUPKI. Situasi tersebut ditandai oleh dinamika ideologis yang kompleks, terutama dalam relasi antara nasionalisme, aspirasi keagamaan khususnya Islam dan realitas pluralitas masyarakat Indonesia.

Dalam konteks demikian, pidato 1 Juni 1945 berfungsi sebagai artikulasi konseptual yang membuka ruang sintesis dan dialog antar-ideologi. Ujaran-ujaran yang disampaikan tidak hanya menawarkan rumusan prinsip, tetapi juga menciptakan ruang kompromi yang kemudian berlanjut pada pembentukan Panitia Sembilan dan perumusan Piagam Jakarta. Oleh karena itu, pidato tersebut harus dipahami sebagai bagian integral dari proses historis pembentukan konsensus ideologis bangsa, yang mempertemukan berbagai latar belakang pemikiran dalam satu kerangka kebangsaan.

Ketiga, dalam perspektif *Speech Act Theory*, pidato 1 Juni 1945 dapat dipahami sebagai rangkaian tindak tutur yang beroperasi secara bertingkat dan saling menguatkan. Pada tingkat ilokusi, pidato tersebut memuat tindakan penilaian normatif mengenai kesiapan bangsa untuk merdeka (*verdictives*), tindakan pengusulan dan pemberian arah terhadap prinsip dasar negara (*exercitives*), pernyataan komitmen dan keyakinan pembicara (*commissives*), pengelolaan relasi komunikasi dan etika dialogis (*behabitives*), serta penataan dan penjelasan kerangka argumentatif (*expositives*). Keseluruhan bentuk ilokusi ini memperlihatkan bahwa pidato tersebut bukan sekadar paparan ide, melainkan tindakan politik yang secara aktif membentuk orientasi berpikir dan bertindak para peserta sidang.

Pada tingkat perlokusi, daya tindak pidato tersebut melampaui respons langsung audiens. Dampaknya bersifat historis dan institusional, karena ujaran-ujaran yang disampaikan mendorong terbentuknya tindakan kolektif, memperkuat proses deliberatif, serta berkontribusi pada lahirnya konsensus ideologis yang

kemudian dilembagakan dalam bentuk Pancasila sebagai dasar negara. Dengan demikian, pidato 1 Juni 1945 dapat dipahami sebagai tindak tutur konstitutif, yakni ujaran yang secara performatif tidak hanya menggambarkan realitas, tetapi turut membentuk dan menginstitutionalisasinya dalam tatanan normatif kenegaraan Indonesia.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pidato 1 Juni 1945 tidak dapat direduksi sebagai ekspresi retorik atau wacana politik semata. Pidato tersebut merupakan tindakan kebahasaan yang memiliki kekuatan performatif dalam proses pembentukan dasar negara. Melalui pendekatan *Speech Act Theory*, tesis ini menunjukkan bahwa lahirnya Pancasila bukan hanya hasil perdebatan ideologis atau keputusan politik formal, melainkan juga merupakan produk dari tindakan komunikasi yang bekerja secara historis, deliberatif, dan institusional dalam membangun fondasi ideologis bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, Cindy, *BUNG KARNO PENYAMBUNG LIDAH RAKJAT INDONESIA*, 1965, https://kepastakaan-presiden.perpusnas.go.id/uploaded_files/pdf/article_clipping/normal/BUNG_KARNO_PENJAMBUNG_LIDAH_RAKJAT_INDONESIA_by_Cindy_Adams.pdf.
- Alston, W., *Illocutionary acts and sentence meaning*, Ithaca: NY: Cornell University Press., 2000.
- Anderson, L. dkk, *Routledge Companion to the Philosophy of Language*, london: Routledge, 2012.
- Ardhan, Dhea, “Analisis Tindak Tutur Ilokusi Dalam Pidato Pembukaan Presiden Joko Widodo Pada Ktt G20 Bali”, *MEMACE: Jurnal Linguistik, Pendidikan Bahasa Indonesia, dan Asing*, vol. 1, no. 2, 2023, pp. 46–54 [https://doi.org/10.55681/memace.v1i2.1010].
- Armstrong, D., *Meaning and communication*, ' *The Philosophical Review*, 1971.
- Asher, N. and A. Lascarides, *Indirect Speech Acts*, Synthese, 2001.
- Asia, Southeast and Program Publications, *Pancasila as the Sole Foundation*, vol. 38, no. 38, 2013, pp. 74–83.
- Austin, J.L., “HOW TO DO THINGS WITH WORDS”, *The Aging Mind*, London: OXFORD AT THE CLARENDON PRESS, 1962 [https://doi.org/10.4324/9781315743448-15].
- Bach, K., *'Performatives are statements too*, *Philosophical Studies*, 1975.
- Basyaruddin, Basyaruddin, “Filsafat Bahasa Sebagai Fundamen Kajian Bahasa”, *Bahas*, vol. 26, no. 1, 2017, pp. 1–9 [https://doi.org/10.24114/bhs.v26i1.5526].

- Bell, M., *The Philosophical Quarterly*, 1975.
- Belnap, N., *Declaratives are not enough*, *Philosophical Studies*, 1990.
- Bertolet, R., *Foundations of Speech Act Theory: Philosophical and Linguistic Perspectives*, London: Routledge, 1994.
- Brata, Ida Bagus and Ida Bagus Nyoman Wartha, “Lahirnya Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia”, *Jurnal Santiaji Pendidikan*, vol. 7, no. 1, 2017, pp. 120–32.
- Cohen, T., *Illocutions and perlocutions*, *Foundations of Language*, 1973.
- Dadang Sunendar, Dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. by David Moeljadi Dkk, Jakarta: Kemendikbud Indonesia, 2023.
- Dinata, Rahmat Satria, Meliza Budiarti, and Musalwa Musalwa, “FILSAFAT ANALITIKA BAHASA: Urgensi Filsafat Bahasa Dalam Landasan Filosofis Pembelajaran Bahasa Arab”, *Jurnal Al-Aqidah*, vol. 13, no. 2, 2021, pp. 137–45 [<https://doi.org/10.15548/ja.v13i2.3195>].
- Elson, R.E., “Two failed attempts to Islamize the Indonesian constitution”, *Sojourn*, vol. 28, no. 3, 2013, pp. 379–437 [<https://doi.org/10.1355/sj28-3a>].
- Fadri, Zainal, “Pidato Pancasila 1 Juni 1945 Soekarno Perspektif Ordinary Language Philosophy”, *Jurnal Rontal Keilmuan PKn*, vol. 6, no. 2, 2020, p. 22, file:///C:/Users/Asus/Downloads/1791-3864-1-PB (1).pdf.
- Fideliz, Andrea, “A CORPUS-DRIVEN ANALYSIS OF THE INAUGURAL ADDRESSES OF THE THREE PHILIPPINE PRESIDENTS A CORPUS-DRIVEN ANALYSIS OF THE INAUGURAL ADDRESSES OF THE THREE PHILIPPINE PRESIDENTS”, *THAMMASAT UNIVERSITY*, 2017.
- GAGNE, ROBERT M., *Linguistic Communication and Speech Acts*, vol. XII, no. 1, 2008.
- Gloor, P.E. et al., *Another Look At The Jakarta Charter Controversy of z1945*, vol. 5, no. 1997, 1997, pp. 1–8.

- Hadikusumo, Ki Bagus, *Islam sebagai Dasar Negara*, Yogyakarta: Pt.Persatuan, 1954.
- Hasanah, Uswatun and Aan Budianto, “Pemikiran Soekarno Dalam Perumusan Pacasila”, *Jurnal Candi*, vol. Vol. 20, no. No. 2, 2020, pp. 31–54, <https://jurnal.uns.ac.id/candi/article/view/44780/28324>.
- Hasyim, Wahid, *Guruku Orang-Orang Pesantren*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Hatta, Mohammad, *Untuk Negeriku: Menuju Gerbang Kemerdekaan*, Jakarta: LP3ES, 1979.
- Husain, Abdulloh, Hamamah Hamamah, and Ika Nurhayani, “Commissive Speech Act in Indonesian Presidential Debate”, *OKARA: Jurnal Bahasa dan Sastra*, vol. 14, no. 1, 2020, p. 81 [<https://doi.org/10.19105/ojbs.v14i1.3141>].
- Imaculata, Maria Gracia, *Ketidakadilan Hukum Bagi Masyarakat Menengah Ke Bawah Ditinjau Dari Konsep Negara Aristoteles Dan Negara Gotong Royong*, 2018.
- Ir. Soekarno, “Indonesia Menggugat”, *Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 1930, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsci.rbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- , *Pidato Ir. Soekarno 1 juni 1945*, Dokuritu zyunbi tyoosakai, 1945.
- , *Dibawah Bendera Revolusi*, jakarta, 1964.
- Jamil, Ibrahim M. et al., *FILSAFAT BAHASA: KEARIFAN, PENGETAHUAN DAN KEBENARAN*, vol. IV, no. 2, 2019, pp. 105–16.
- Kaelan, “Kesatuan Sila-sila Pancasila”, *Jurnal Filsafat*, vol. 1, no. 1, 1996, pp. 42–52, <https://journal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/31640>.
- , *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, ed. by Paradigma, Yogyakarta, 2009.

- Kone, A., *Repetitions in Soekarno's speech*, 2019, pp. 2–7
[\[https://doi.org/10.4108/eai.21-12-2018.2282777\]](https://doi.org/10.4108/eai.21-12-2018.2282777).
- Littlejohn, Stephen W., *Theories of Human Communication*, 1983.
- Ludwig Wittgenstein, “Philosophical Investigations”, in *Philosophical Investigations*, 1958, pp. 20–33.
- Maarif, Ahmad Syafii, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Mabaquiao, Napoleon M., *Speech Act Theory : From Austin to Searle*, vol. 19, no. 1, 2018, pp. 35–45.
- MKRI, *Perumusan Pancasila dalam sidang bpupki*, vol. 105, no. 3, 1945, pp. 129–33,
<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.
- MUKOYIMAH, *RETORIKA DALAM PIDATO SOEKARNO PADA DEMOKRASI TERPIMPIN (Analisis Dakwah)*, 2018, p. 165.
- Mulyani, Martina and Vina Nurviyani, *The Analysis of Soekarno's Speech on Nation Foundation: Demystifying the Ideology of Pancasila Using Foucauldian Methods*, vol. 82, no. Conaplin 9, 2017, pp. 122–6
[\[https://doi.org/10.2991/conaplin-16.2017.26\]](https://doi.org/10.2991/conaplin-16.2017.26).
- Ningsih, Indryani Silvia, “Hakikat Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara”, *OSF Preprints*, no. 7, 2021, p. 1,
https://drive.google.com/file/d/13rLIkoAoa2Hx47Jta7r13Uc4jdcjNDKD/view?usp=drive_link.
- Noer, Deliar, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia*, vol. 118, no. 5, 2013, pp. 1467–73, <http://www.jstor.org/stable/10.1086/670524>.
- Paisol Burlian, *PEMIKIRAN SOEKARNO DALAM PERUMUSAN PANCASILA*,

2022, pp. 143–69.

Patricia, Cisneros Ortega Sara, “ANALISIS PENERAPAN SISTEM KLASIFIKASI DDC DALAM PENGOLAHAN PUSTAKA”, *EDUKASI NON FORMAL*, vol. 3, no. 2, 2021, p. 6.

Razuni, Ganjar, “BUNG KARNO’s POLITICAL THOUGHT ACCORDING TO PANCASILA: A Study of Bung Karno’s Speech on June 1, 1945, and the President Soekarno/Bung Karno’s Pancasila Course Throughout 1958-1959”, *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, vol. 8, no. 2, 2023, p. 223
[<https://doi.org/10.24198/jwp.v8i2.50119>].

Rohman, Fatkhur et al., “Analisis Historis Perumusan Pembukaan UUD 1945 Fatkhur”, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, vol. 2, no. 5, 2024, pp. 147–54,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11372406>.

Rohmaniyah, Inayah dkk, *PEDOMAN PENULISAN PROPOSAL DAN SKRIPSI*, Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Safroedin Bahar, *Risalah sidang badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) : Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) 29 Mei 1945 - 19 Agustus 1945*, ed. by Safroedin Bahar, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1992,
<https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=103122>.

Saifudin, Akhmad, “Teori Tindak Tutur dalam Studi Linguistik Pragmatik”, *LITE: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya*, vol. 15, no. 1, 2019, pp. 1–16
[<https://doi.org/10.33633/lite.v15i1.2382>].

Salim, Agus, *Kumpulan Tulisan Agus Salim*, Jakarta: Tintamas, 1884.

Searle, John R..., *Speech Acts : An Essay in the Philosophy of Language*, vol. 46, no. 1, 1970, pp. 217–27.

Sembilan, Panitia, *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI*, Jakarta: Sekretariat Negara

Republik Indonesia, 1995.

Smith, Barry, *Towards a History of Speech Act Theory*, 1990.

Soekarno, *Lahirnya Pancasila: Pidato 1 Juni 1945*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1985.

Sujoko, Anang, Fidelis Anggiornamento Saintio, and Dicky Wahyudi, "Identitas Keindonesiaan dalam Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol. 19, no. 2, 2021, p. 188
[<https://doi.org/10.31315/jik.v19i2.4609>].

Sumarno, Hari, *Manusia Indonesia Manusia Pancasila*, Jakarta timur: Ghalia Indonesia, 1964.

Sutarto, St., *Konflik di balik proklamasi: BPUPKI, PPKI, dan Kemerdekaan*, Universitas Indonesia, 2010,
<https://lib.ui.ac.id/detail?id=20297227&lokasi=lokal>.

Wahyudi, Yudian, *Membumikan Pancasila*, Yogyakarta: Cakrawala, 2023.

Yudhi Latief, *Negara Paripurna*, 2024.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA